

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-TLE DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN MENURUNKAN ANGKA KECELAKAAN Studi Pada Polres Metro Tangerang Kota

Caesarisca Afriliyanita Putri¹, MI Suhifatullah², Hardjito S Darmojo³

Program Pascasarjana Univesitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Corespondent: hardjito.darmojo@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul 'Implementasi Kebijakan E-TLE dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas dan Menurunkan Angka Kecelakaan (Study Kasus: Polres Metro Tangerang Kota)' Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dari adanya implementasi kebijakan E-TLE di Kota Tangerang dengan menggunakan studi kualitatif deskriptif dan pendekatan study kasus. Sumber data untuk penelitian ini adalah Satlantas Polres Metro Tangerang Kota Unit Gakkum Divisi Dakgar dan juga Masyarakat Kota Tangerang. Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yang mendalam, observasi serta studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dengan hasil yang didapatkan yaitu sebagai berikut: (1) Standar dan tujuan dari kebijakan E-TLE masih belum efektif, hal ini disebabkan meskipun standarisasi dan juga telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang undangan namun konsistensinya belum terlaksana dengan baik. (2) Sumber daya dari pelaksanaan E-TLE di Kota Tangerang dinilai belum efektif sebab SDM yaitu staff dari dakgar masih banyak yang belum mendapatkan pelatihan, anggaran pun masih kurang memadai dan juga peralatan yang masih kurang untuk dapat menunjang pelaksanaan tilang elektronik di Kota Tangerang. (3) Karakteristik organisasi dari segi SOP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dengan baik oleh petugas namun masih terdapat misinterpretasi dari masyarakat Kota Tangerang terkait pelaksanaannya. Untuk fragmentasi, para pemangku jabatan telah memahami jobdesk masing masing dan sudah terlaksana namun belum seluruhnya dapat menjalankan perannya secara optimal. (4) Komunikasi antar organisasi sudah terjalin dengan baik kepada para pemangku jabatan khususnya pada staff Satlantas Polres Metro Tangerang Kota, namun komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat Kota Tangerang masih banyak yang belum memahami tilang elektronik itu seperti apa. (5) Disposi (sifat pelaksana) dalam pelaksanaan tilang elektronik cukup kooperatif dan juga membantu masyarakat Kota Tangerang dalam melakukan konfirmasi tilang elektronik. (6) Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi dari masyarakat Kota Tangerang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan E-TLE di Kota Tangerang, masih banyaknya masyarakat yang belum menerima adanya tilang elektronik serta rasa cuek terhadap ketertiban lalu lintas, terkait lingkungan ekonomi untuk masyarakat yang terdampak sangat mempengaruhi terlebih yang berpenghasilan rendah selain itu berdampak pada pendapatan daerah karena denda tilang masuk pada PNBP

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, E-TLE, Kota Tangerang

Abstract

This study is entitled 'Implementation of E-TLE Policy in Improving Traffic Order and Reducing Accident Rates (Case Study: Tangerang City Metro Police)' This study aims to find out the implementation of the E-TLE policy in Tangerang City by using a descriptive qualitative study and a case study approach. The data sources for this study are the Tangerang City Metro Police Traffic Unit, Gakkum Unit, Dakgar Division and also the Tangerang City Community. This research technique was carried out by means of in-depth interviews, observations and documentation studies. This study uses the Van Meter and Van Horn policy implementation theory, with the following results: (1) The standards and objectives of the E-TLE policy are still ineffective, this is because even though standardization has been determined based on regulations and laws, the consistency has not been implemented properly. (2) The resources for the implementation of E-TLE in Tangerang City are considered ineffective because many human resources, namely staff from the Dakgar, have not received training, the budget is still inadequate and there is still a lack of equipment to support the implementation of electronic ticketing in Tangerang City. (3) The organizational characteristics in terms of SOPs are in accordance with applicable regulations and are well implemented by officers, but there are still misinterpretations from the Tangerang City community regarding its implementation. Regarding fragmentation, officials have understood their respective job descriptions and have implemented them, but not all have been able to carry out their roles optimally. (4) Inter-organizational communication has been well established with officials, especially the Tangerang City Metro Police Traffic Unit staff, but in communication with the Tangerang City community, many still do not understand what electronic ticketing is. (5) The disposition (nature of the implementers) in implementing electronic ticketing is quite cooperative and also helps the Tangerang City community in confirming electronic ticketing. (6) The social and economic conditions of the Tangerang City community greatly influence the implementation of the E-TLE policy in Tangerang City. Many people still have not accepted the existence of electronic ticketing and feel indifferent to traffic order. Regarding the economic environment, it is very influential for affected communities, especially those with low incomes. In addition, it has an impact on regional income because traffic ticket fines are included in the PNPB.

Keywords: Policy Implementation, E-TLE, Tangerang City

A. Pendahuluan

Teknologi diabad ke 21 telah berkembang pesat dan menjadi sebuah kebutuhan bagi umat manusia seperti dalam mengerjakan tugas, bersosialisasi dari jarak jauh dan lain sebagainya. Terkait hal ini, perkembangan teknologi tidak hanya berbentuk program seperti adanya AI maupun perangkat teknologi seperti halnya robot, handphone maupun komputer saja, namun teknologi dalam bidang transportasi pun sudah semakin berkembang dengan pesat.

Teknologi transportasi adalah suatu inovasi dalam transportasi untuk memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa Transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis serta berperan dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan. Baik itu dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan juga keamanan.

Meskipun transportasi memberikan banyak manfaat serta kemudahan dalam berbagai aktivitas seperti yang telah dicantumkan sebelumnya, namun apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan beberapa masalah. Tamin (2000) dalam Pardede *et al* (2022:62) pun menjelaskan bahwa setiap negara baik itu negara maju maupun berkembang memiliki masalah yang sama yaitu masalah transportasi seperti transportasi antar kota maupun transportasi dalam kota. Hal ini memerlukan adanya peran dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara.

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2 ayat (29) bahwa Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Hal ini pun ditanggapi oleh pendapat Tamin (2008) dalam Halawa (2023:06) menyebutkan bahwa manajemen lalu lintas adalah penanganan yang ditekankan kepada pemanfaatan dan juga pengaturan fasilitas ruas jalan yang ada, secara efektif dan optimal baik dari segi kapasitas maupun segi keamanan lalu lintas sebelum adanya pelebaran ataupun pembangunan jalan baru. Sasaran teknis dalam manajemen lalu lintas adalah: (1) Mengatur dan menyederhanakan arus lalu lintas. (2) Mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas. (3) Meminimalisir gangguan arus lalu lintas. (4) Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. (5) Terjadinya kondisi lingkungan dari dampak negative lalu lintas dengan melakukan analisis dampak lalu lintas. Hal serupa pun ditanggapi Yulipriyono (2017) dalam Lambang Basri Said *et al* (2023) mengatakan bahwa hadirnya manajemen lalu lintas dapat mengurangi biaya tempuh pergerakan, mempertinggi keselamatan pergerakan, mempertinggi keamanan dan juga kemudahan fasilitas. Selain itu, hadirnya manajemen lalu lintas pun dapat mengurangi terjadinya kemacetan lalu lintas.

Untuk melihat implementasi kebijakan E-tle Dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas dan Menurunkan Angka Kecelakaan di Poles Metro Tangerang Kota bisa berjalan baik atau tidaknya, Syaffri & Setyoko (2016: 16-17) menyebutkan bahwa dalam analisis Van Meter dan Van Horn, menyebutkan ada 6 indikator yang terbagi sebagai berikut, yaitu: *Policy (Standard and Objective, Resources), Linkage (Interorganizational Communication and Enforcement Activities, Characteristics of the Implementing Agencies, Economics Social and Political Condition, The disposition of Implementor) and Performances.*

Berdasarkan data dari *Electronic Registration Identification* (ERI) tahun 2025 bahwa jumlah kendaraan sepeda motor di sekitar wilayah Kota Tangerang berjumlah sekitar 1.500.000 Unit, ditambah dengan kendaraan lain yang berlalu-lalang. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan kemacetan serta memicu terjadinya pelanggaran dan juga kecelakaan lalu lintas. Untuk dapat mengatasi hal seperti ini, diperlukan peran kepolisian dalam mengatur dan juga menjaga ketertiban lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi dalam penegakan hukum berhak untuk memberikan tindakan berupa sanksi ataupun teguran kepada masyarakat yang telah melanggar peraturan dengan

memberikan tilang (bukti pelanggaran) sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dibantu oleh Dirlantas Polri.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah memberikan instruksi lewat surat telegram dengan nomor: ST/2664/X/HUM.3.4.5/2022. Isi surat tersebut memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Republik Indonesia untuk menghentikan sistem tilang konvensional dan menggantinya dengan sistem tilang statis. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan tindakan pungli antar aparat dan juga masyarakat. Tilang statis ini bisa disebut sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE).

Electronic Traffic Law Enforcement adalah sistem penegakan hukum lalu lintas menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan juga merekam pelanggaran lalu lintas yang terjadi secara otomatis. Sistem ini menggunakan kamera CCTV yang aktif selama 24 jam sehingga dapat memantau serta meng-*capture* gambar secara otomatis saat terjadi pelanggaran lalu lintas di ruas jalan yang telah terpasang kamera. Dilansir dari website Viva.co.id, Indonesia mulai menerapkan sistem tilang elektronik tanggal 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya yang berlokasi di Bundaran Pantung Kuda dan Sarinah – Thamrin. Hasil Evaluasi menyimpulkan bahwa E-TLE di Kota Jakarta dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,2%. (Sihite & Priliawito, 2020).

Melihat manfaat dari adanya pemanfaatan sistem teknologi E-TLE di beberapa negara serta melihat kesuksesan Kota DKI Jakarta dan juga berdasarkan instruksi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, maka Polres Metro Tangerang Kota dibantu Satlantas Polres Metro Tangerang Kota pun turut menerapkan program E-TLE pada akhir tahun 2022. Hal ini berdasarkan dari pernyataan Kepala Syb- Unit II (Kasubunit II) Satlantas Polres Metro Tangerang Kota yaitu bapak Alex Rusman, beliau mengatakan bahwa Kota Tangerang mulai memasang kamera CCTV pertama kali di Wilayah Daan Mogot pada bulan Januari 2023.

Kapolri berharap dengan adanya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau tilang elektronik mampu menghindari potensi terjadinya pungli antara masyarakat dan staff satlantas serta dapat menjadi bagian dari edukasi hukum kepada masyarakat agar sadar dan patuh terhadap peraturan – peraturan lalu lintas sehingga dapat menciptakan budaya ber-lalu lintas masyarakat yang lebih maju (Zulfikar, 2023), tapi pada kenyataannya bahwa ketertiban dalam berlalu lintas masyarakat Kota Tangerang belum menunjukkan adanya suatu peningkatan. Hal ini dapat ditunjukan adanya peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Satlantas Polres Metro Tangerang Kota (Dakgar) terkait kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Tahun 2022 – 2023 sebagai berikut : Tahun 2022, jumlah kecelakaan 606 kejadian dan di Tahun 2023 naik menjadi 917 kejadian, sedangkan jumlah korban kecelakaan di tahun 2022 adalah 771 orang, dan di tahun 2023 menjadi 1183 orang.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini :

1. Bagaimana komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan E-TLE dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan di Wilayah Kota Tangerang?

2. Bagaimana sumber daya dari E-TLE dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan di Wilayah Kota Tangerang?
3. Bagaimana sifat pelaksana (disposisi) dari implementasi kebijakan E-TLE dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan di Wilayah Kota Tangerang?
4. Bagaimana kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik terkait implementasi kebijakan E-TLE dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan di Wilayah Kota Tangerang?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang gunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi *Electronic Traffic Enforcement Law* (E-TLE) atau biasa disebut E-tilang adalah salah satu inovasi kebijakan dari kepolisian dengan menggunakan teknologi untuk menjaga ketertiban ber-lalu lintas, sebagaimana telah tertuang dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA) pasal 272 ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 23. Penelitian ini dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota Tangerang dan dilaksanakan sejak dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan April 2025,

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil
 - a. Komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan E-TLE dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan di Wilayah Kota Tangerang. Komunikasi antar Organisasi dari implementasi kebijakan E-TLE di Kota Tangerang, dari segi komunikasi internal yaitu kepada staff satlantas dilakukan dengan transmisi informasi yaitu rapat koordinasi serta evaluasi dan informasi yang dijelaskan pun sudah jelas dan juga secara konsisten terus dilakukan. Terkait komunikasi eksternal kepada *stake holder* dilakukan dengan cara FGD dan juga evaluasi dilakukan sehingga kejelasan dan konsistensi masih terjaga, untuk masyarakat transmisi informasi dilakukan dari mulut ke mulut dan juga lewat media sosial sehingga untuk pemahaman dari segi masyarakat tergantung dari pemahaman masyarakat sekitar dan konsistensi dalam informasi tidak dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Metro Tangerang Kota.
 - b. Sumber daya dari E-TLE dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan di Wilayah Kota Tangerang.
Sumber daya dari implementasi kebijakan E-TLE di wilayah Kota Tangerang dinilai belum cukup memadai, hal ini dikarenakan staff kepolisian yang belum seluruhnya mendapatkan verifikasi E-TLE dan juga kamera\ CCTV dan juga jaringan yang masih kurang menyebabkan implementasi ini belum efektif. Sumber daya anggaran didapatkan dari hibah APBD Kota Tangerang, sehingga memiliki keterbatasan anggaran.

c. Sifat pelaksana (disposisi) dari implementasi kebijakan E-TLE dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan di Wilayah Kota Tangerang Disposisi (Sikap Pelaksana) dari implementasi kebijakan E-TLE di Wilayah Kota Tangerang sudah berjalan secara efektif dalam Meningkatkan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan. Sikap pelaksana yang merasa terbantu akan adanya E-TLE dapat memberikan kemudahan sehingga petugas dapat tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas.

d. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik terkait Implementasi Kebijakan E-TLE dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas dan Menurunkan Angka Kecelakaan di Kota Tangerang

Kondisi Lingkungan Sosial dan Ekonomi masyarakat Kota Tangerang sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan E-TLE di Kota Tangerang. Masyarakat yang masih cuek menyebabkan E-TLE belum berjalan dengan baik serta lingkungan ekonomi mempengaruhi E-TLE namun hanya untuk masyarakat yang terkena tilang elektronik.

2. Pembahasan

a. **Komunikasi antar Organisasi dari Implementasi Kebijakan E-TLE dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas dan Menurunkan Angka Kecelakaan di Wilayah Kota Tangerang**

Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan mudah dipahami transmisi, maka komunikasi terbagi kedalam rang lingkup menjadi 2 (dua) bagian yaitu komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Dijelaskan dalam Damayani Pohan & Fitria (2021:35), bahwa komunikasi Internal terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut: (1) Komunikasi vertical: bentuk komunikasi dari pemimpin kepada anggota. (2) Komunikasi horizontal: Bentuk komunikasi sesama karyawan dengan jabatan yang setara. (3) Komunikasi diagonal: Bentuk komunikasi dari sesama karyawan namun dengan jabatan atau kedudukan yang berbeda, dan komunikasi eksternal menurut Effendy (2003) dalam (Alipi, 2019), adalah komunikasi yang dilakukan untuk dapat memelihara dan juga membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan *costumer, community, government* dan lainnya dari luar organisasi.

b. Sumber daya dari E-TLE dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan di Wilayah Kota Tangerang.

Sumber daya manusia menurut Darmadi dalam (Hidayat & Anwar, 2023) adalah sekelompok manusia atau per-individual yang bekerja sebagai penggerak dalam suatu organisasi, baik itu dalam instansi pemerintahan maupun organisasi swasta yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih serta dikembangkan kemampuannya, anggaran untuk menunjang implementasi kebijakan E-TLE dengan para *stake holder* diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang dengan masa hibah 1 (satu) tahun 2023 hingga tahun 2024 dan selanjutnya akan dikelola oleh tim Polres Metro Tangerang Kota menggunakan dana dari POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) dan kaitan peralatan E-TLE di Kota Tangerang belumlah memadai selain dari kuantitas kamera yang masih kurang, dalam implementasi sistem E-TLE ini pun jaringan yang

buruk menyebabkan kesulitan bagi petugas kepolisian untuk melakukan tugas di *back office* untuk dapat identifikasi pelanggaran serta mengirim data ke *stake holder*. Pemeliharaan peralatan sangat diperlukan, hal ini diungkapkan oleh Purwanto dan Muhammad Ali dalam Muttaqin et al (2023:105) bahwa pemeliharaan adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk dapat meningkatkan, mempertahankan dan juga mengembalikan kondisi peralatan agar dapat berfungsi dengan baik.

- c. Sifat pelaksana (disposisi) dari implementasi kebijakan E-TLE dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan di Wilayah Kota Tangerang. Disposisi atau sikap dari pelaksana sangat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan yang akan dijalankan oleh para implemntor. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan bahwa disposisi adalah sebuah sikap dari pelaksana suatu implementasi kebijakan dengan menyaring kejadian terlebih dahulu melalui persepsi dan juga pemikiran dari para implementor. Hal ini pun diperjelas oleh George Edward II, bahwa disposisi adalah suatu hal yang penting dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan apabila staff tidak menjalankan kebijakan dengan baik maka dapat meimbulkan hambatan – hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Terkait hal ini dibutuhkan komitmen organisasi dan juga evaluasi rutin agar kebijakan pun dapat berjalan dengan baik. Menurut Chalofsky dan Krishna (2009) mengatakan komitmen dan keterlibatan karyawan berkembang sebagai fondasi terpenting karena dapatmendorong retensi (Ketahanan) perusahaan serta kinerja dari karyawan.
- d. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik terkait Implementasi Kebijakan E-TLE dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas dan Menurunkan Angka Kecelakaan di Kota Tangerang.

Lingkungan eksternal dalam implementasi suatu kebijakan sangat berpengaruh pada keberhasilan ataupun kegagalan pada daerah yang sedang menerapkan kebijakan tersebut. Untuk dapat menjawab indikator ini, peneliti menggunakan lingkungan sosial dan juga lingkungan ekonomi pada implementasi kebijakan E-TLE di Wilayah Kota Tangerang. Lingkungan sosial menurut Dewantara (2010) dalam Pakaya et al (2021) ialah suatu hal yang dapat mempengaruhi manusia, Dewantara membagi lingkungan sosial menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) Lingkungan Keluarga: Keluarga adalah hal pertama yang menjadi ruang belajar pertama bagi manusia sehingga suasana dan juga interaksi dengan keluarga pun dapat mempengaruhi kepribadian dari seseorang. (2) Lingkungan Pendidikan adalah lingkungan formal yang memiliki peranan penting dalam mencerdaskan dan juga membimbing moral serta perilaku pada setiap strata masyarakat. (3) Lingkungan Masyarakat adalah suatu bentuk dari adanya kehidupan interaksi antar sesama masyarakat sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan juga kebiasaan dari masyarakat setempat.

D. Kesimpulan

- 1. Komunikasi antar Organisasi dari implementasi kebijakan E-TLE di Kota Tangerang, dari segi komunikasi internal yaitu kepada staff satlantas dilakukan dengan transmisi informasi yaitu rapat koordiansi serta evaluasi dan informasi yang dijelaskan pun

sudah jelas dan juga secara konsisten terus dilakukan. Terkait komunikasi eksternal kepada *stake holder* dilakukan dengan cara FGD dan juga evaluasi dilakukan sehingga kejelasan dan konsistensi masih terjaga, untuk masyarakat transmisi informasi dilakukan dari mulut ke mulut dan juga lewat media sosial sehingga untuk pemahaman dari segi masyarakat tergantung dari pemahaman masyarakat sekitar dan konsistensi dalam informasi tidak dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Metro Tangerang Kota.

2. Sumber daya dari implementasi kebijakan E-TLE di wilayah Kota Tangerang dinilai belum cukup memadai, hal ini dikarenakan staff kepolisian yang belum seluruhnya mendapatkan verifikasi E-TLE dan juga kamera\ CCTV dan juga jaringan yang masih kurang menyebabkan implementasi ini belum efektif. Sumber daya anggaran didapatkan dari hibah APBD Kota Tangerang, sehingga memiliki keterbatasan anggaran
3. Disposisi (Sikap Pelaksana) dari implementasi kebijakan E-TLE di Wilayah Kota Tangerang sudah berjalan secara efektif dalam Meningkatkan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan. Sikap pelaksana yang merasa terbantu akan adanya E-TLE dapat memberikan kemudahan sehingga petugas dapat tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas.
4. Berpengaruh pada implementasi kebijakan E-TLE di Kota Tangerang. Masyarakat yang masih cuek menyebabkan E-TLE belum berjalan dengan baik serta lingkungan ekonomi mempengaruhi E-TLE namun hanya untuk masyarakat yang terkena tilang elektronik.

Referensi

Buku

- Awir, M. (2021). *Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik (Konseptual dan Praktik)*. DeePublis.
- Igiris, I. (2022). *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris.*, Tanah Air Beta. Yogyakarta.
- Iriawan, H, (2024). *Teori Kebijakan Publik.*, LITNUS.
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. KA (Kedai Aksara)
- Maksudi, B.I. (2018). *Dasar – dasar Administrasi Publik dari Klasik ke Kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Supit, B.F. (2023). *Konsep Dasar Komunikasi Organisasi*. Tahta Media Group.
- Syaffri, W., & Setyoko, P. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Bandung: AlqaPrint Jatinangor.

Jurnal

- Arnia., et al. (2024). Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Kantor Direktorat Lalu Lintas Kota Palu. *JPS (Journal of Publicness Studies*, 1(3).
- Bakri et al. (2020). Efektifitas Penerapan Program E-Tilang dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *JLT(Journal of Lex Theory)*, 1(1)., E-ISSN: 2722-1288., Juni 2020.

- Cahyaningtyas, V., & Angin, R. (2023). Inovasi Menulis Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik Kajian Sistem Manajemen Pelayanan Desa (SIMPEDA) di Desa Balunglor. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(1), 14 November 2023
- Damayani, Pohan et al. (2021). Jenis- Jenis Komunikasi. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2(3).
- Fathony, et al. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. *Jurnal AGREGASI (Jurnal Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi)*, 9(2). ISSN:237 - 5299
- Gantika, S et al. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan di Kabupaten Badung Barat. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 2.
- Hartina, A. (2019). Persepsi Masyarakat tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi dalam Wilayah Kota Masyarakat). Universitas Negeri Makassar.
- Hidayat, & Anwar, S.A. (2023) Manajemen Sumber Daya Manusia (Study Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qurrota A'yun). *JSTAF (Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah)*, 2(3). E-ISSN: 2089-5364., Juli 2023.
- Ilhami, M et al. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9)., E-ISSN: 2089-5364.
- Julfitri, R., & Prakoso, C.T. (2023). Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi dalam Mengakses Fasilitas Publik di Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Publik*, 11(2). E-ISSN: 2541-674x. Sosial dan Koproduksi), (1)., Suluh Media.
- Kartono & Tri Lestari, N. (2024). Efektifitas Penerapan Sistem E-Tilang Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Tangerang Selatan dalam Menuju Pemerintahan yang Good Governance. *Prosiding:Senantiasa:Seminara Hasil Penelitian dan PKM*, 5(2)., E-ISSN: 2775-8095.
- Kristanto, M et al. (2024). Strategi Mencegah Persepsi Menakutkan pada Pembelajaran Matematika Sejak Dini (Sebuah Kajian Pustaka). *ijolli (Indonesian Journal of Learning & Instructional Innovation)*, 2(1). E-ISSN: 2686-0112. 30 Juni 2024.
- Kurnia Wahyu, N. (2024). Efektifitas Program E-TLE dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya. *Journal Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 8(3). E-ISSN: 2461-0770.
- Kusumaningrum, I .,& Prisgunanto, I. (2023). Kompetensi Anggota Polri dalam Penerapan E-TLE guna Pencegahan Distracted Driving di Polda Kalimantan Barat untuk Mewujudkan Kamseltibcarlantas. *Portofolio:Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(2)., E-ISSN: 2829-6109
- Laary, Y et al. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *JAP (Journal Administrasi Publik)*, 8(120), 60 -67.
- Lambang, B.S, et al. (2023). Penerapan Manajemen Lalu Lintas untuk Menangggulangi Menangggulangi Kemacetan Lalu Lintas (Simpang bersinyal Jalan Mangunsidi dan Jalan Bulu Kunyi). *MACCA (Jurnal Teknik Sipil)*, 8(2)., ISSN: 2541-0148
- Lestari, P.A, & Pohan, C.A. (2021). Analisis Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis dalam Menangkal Penghindaran Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2019. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2).

- Lubis, M. (2020) Komunikasi Antar Pribadi Guru dan Siswa dalam Mencegah Kenakalan Remaja. *Jurnal Network Media*, 3(1). Februari 2020.
- Lumika, A., & Purnama Sari, W. (2022). Analisisi Komunikasi Internal dalam Membangun Kinerja yang Baik. *Kiwari*, 1(2), 350-355.
- Muhaling et al. (2021). Implemetasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado. *Jurnal Emba*, 9(4), 572-581., E-ISSN: 2303-1174.
- Muttaqin et al. (2023). Analisis Perlengkapan Peralatan Kantor Bagian Akuntansi pada PT. Pertamina. *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 1(6). E-ISSN: 3025-5899.
- Tresiana, N., & Duadji, N., (2021). Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Alipi., (2019)., Komunikasi Eksternal Efektif Sebagai Kunci Keberhasilan Masyarakat. *Ibriez: Journal Kependidikan Dasar Islami Berbasis Sains*, 4(1).